

		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%
		Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	92%
5.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.04.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi Pembangunan	80%
		Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	75%
		Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	80%
		Persentase fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah	85%
5.04.3	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	80%
		Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	75%
		Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	80%
		Persentase fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	85%
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH		
6.01	URUSAN PENGAWASAN		
6.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
6.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85%

6.01.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
7.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
7.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
7.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	90%
7.01.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	85%
7.01.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	80%
7.01.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	85%
7.01.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	85%
7.01.6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	90%
8.	UNSUR KECAMATAN		
8.01	KECAMATAN TALIABU BARAT		
8.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	85,00%
8.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	30,00%

8.01.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat pada Musrenbang dan pemberdayaan masyarakat	100,00%
8.01.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	52,00%
8.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya tugas Forkopimcam di kecamatan	17,00%
8.02 KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT			
8.02.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	54,00%
8.02.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	30,00%
8.02.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat pada Musrenbang dan pemberdayaan masyarakat	100,00%
8.02.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	10,00%
8.02.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya tugas Forkopimcam di kecamatan	17,00%
8.02.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00%
8.03 KECAMATAN LEDE			
8.03.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	82,00%
8.03.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	60,00%
8.03.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat pada Musrenbang dan pemberdayaan masyarakat	100,00%
8.03.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	70,00%

8.03.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya tugas Forkopimcam di kecamatan	55,00%
8.03.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00%
8.04 KECAMATAN TALIABU UTARA			
8.04.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	84,00%
8.04.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	45,00%
8.04.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat pada Musrenbang dan pemberdayaan masyarakat	80,00%
8.04.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	70,00%
8.04.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya tugas Forkopimcam di kecamatan	55,00%
8.04.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00%
8.05 KECAMATAN TABONA			
8.05.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	70,00%
8.05.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	25,00%
8.05.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat pada Musrenbang dan pemberdayaan masyarakat	30,00%
8.05.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	10,00%
8.05.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya tugas Forkopimcam di kecamatan	15,00%

8.05.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	20,00%
8.06	KECAMATAN TALIABU TIMUR		
8.06.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	54,00%
8.06.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	43,00%
8.06.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat pada Musrenbang dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100,00%
8.06.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	20,00%
8.06.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya tugas Forkopimcam	17,00%
8.06.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00%
8.07	KECAMATAN TALIABU TIMUR SELATAN		
8.07.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	50,00%
8.07.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	30,00%
8.07.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat pada Musrenbang dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100,00%
8.07.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	52,00%
8.07.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya tugas Forkopimcam	33,00%
8.07.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100,00%

8.08	KECAMATAN TALIABU SELATAN		
8.08.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	80,00%
8.08.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	42,00%
8.08.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat pada Musrenbang dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100,00%
8.08.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	52,00%
8.08.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya tugas Forkopimcam	33,00%
8.08.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan	100,00%



RKPD 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN
PULAU TALIABU

BAB VII PENUTUP

RKPD 2027

KABUPATEN PULAU TALIABU



TALIABU MAJU,
SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan pembangunan, serta masyarakat dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2027 agar berjalan secara terukur, terpadu, efektif, dan berkelanjutan. RKPD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan tahunan, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, dan target pembangunan jangka menengah daerah dengan pelaksanaan pembangunan yang nyata di lapangan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun provinsi, serta mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan partisipatif. Selain itu, RKPD Tahun 2027 juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, perkembangan kondisi sosial ekonomi daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, serta potensi dan peluang yang dimiliki Kabupaten Pulau Taliabu.

Tahun 2027 merupakan tahun yang penting dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029. Pada tahun ini, berbagai program prioritas pembangunan yang telah dirancang pada awal periode RPJMD diharapkan mulai menunjukkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2027 menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sebagai daerah kepulauan yang memiliki posisi strategis di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang tidak ringan. Keterbatasan konektivitas antarwilayah, kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan. Di sisi lain, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta ekonomi kreatif yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah di masa mendatang.

RKPD Tahun 2027 disusun untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, yaitu:

“Mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, Adaptif) yang Maju di Provinsi Maluku Utara.”

Visi tersebut menggambarkan cita-cita pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang berorientasi pada penguatan kemandirian daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai, serta kemampuan daerah untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang terus berkembang. Visi tersebut menjadi landasan bagi seluruh kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan daerah Tahun 2027 diarahkan melalui lima prioritas pembangunan, yaitu: (1) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; (2) Pembangunan

Infrastruktur yang Mendorong Produktivitas Ekonomi Wilayah; (3) Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Penguatan Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan; serta (5) Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah. Kelima prioritas tersebut merupakan agenda pembangunan yang saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

7.1 Makna Strategis RKPD Tahun 2027 dalam Pencapaian Visi Kabupaten MUDA

RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 memiliki makna strategis sebagai instrumen pelaksanaan pembangunan yang menjembatani arah kebijakan jangka menengah daerah dengan implementasi program dan kegiatan pembangunan tahunan. RKPD menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tetap selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Visi Kabupaten MUDA bukan sekadar slogan pembangunan, melainkan representasi dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan transformasi pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan masa depan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pembangunan Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat empat dimensi utama yang terkandung dalam visi tersebut.

Dimensi Mandiri diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan daerah, penguatan sektor-sektor produktif, peningkatan investasi, pengembangan UMKM, peningkatan produktivitas masyarakat, serta penguatan kapasitas fiskal daerah. Kemandirian daerah menjadi fondasi penting agar Kabupaten Pulau Taliabu mampu tumbuh dan berkembang dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.

Dimensi Unggul diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan kompetensi tenaga kerja, peningkatan kualitas aparatur, serta penguatan inovasi daerah. Keunggulan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing daerah dan menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Dimensi Damai diwujudkan melalui penguatan stabilitas sosial, peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penguatan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan toleransi sosial, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis menjadi prasyarat utama bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Dimensi Adaptif diwujudkan melalui peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, perubahan iklim, risiko bencana, serta dinamika sosial dan ekonomi. Kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan.

Melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2027, seluruh sumber daya pembangunan diarahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran RPJMD serta menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, RKPD Tahun 2027 memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat fondasi pencapaian visi Kabupaten MUDA yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

7.2 Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi

sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Sebagai daerah kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sebagai modal dasar pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat di masa depan.

Dalam konteks pembangunan daerah, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup, perlindungan kawasan hutan dan pesisir, pengelolaan sampah dan limbah, pengurangan risiko bencana, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Selain aspek lingkungan, pembangunan berkelanjutan juga menuntut adanya pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi. Pendekatan pembangunan yang inklusif diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Pembangunan berkelanjutan juga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan agar seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan komitmen yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

7.3 Penguatan Kolaborasi dan Partisipasi Pembangunan

Keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya melalui peran pemerintah daerah semata. Pembangunan yang berhasil membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan masyarakat secara luas.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2027, penguatan kolaborasi dan partisipasi pembangunan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, memperluas jangkauan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hasil pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara guna memastikan keselarasan kebijakan pembangunan dan optimalisasi dukungan program pembangunan yang bersumber dari pemerintah yang lebih tinggi. Sinergi tersebut sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan dasar, dan pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

Partisipasi masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong keterlibatan

masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan melalui berbagai forum dan mekanisme partisipatif.

Peran dunia usaha juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pengembangan usaha lokal. Pemerintah daerah akan terus menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan kemudahan pelayanan investasi untuk mendorong masuknya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Di sisi lain, perguruan tinggi dan lembaga penelitian diharapkan dapat berkontribusi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan penelitian. Sementara itu, media massa diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi pembangunan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui kolaborasi yang kuat dan partisipasi yang luas dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

7.4 Harapan Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu ke Depan

Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diharapkan menjadi momentum penting dalam mempercepat transformasi daerah menuju terwujudnya Kabupaten MUDA yang maju di Provinsi Maluku Utara. Berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelestarian lingkungan hidup.

Ke depan, Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu menjadi daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ditopang oleh sektor-sektor unggulan yang produktif dan berdaya saing. Pengembangan sektor perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil menengah diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Di bidang sumber daya manusia, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, serta kapasitas generasi muda sebagai agen pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Pulau Taliabu di tingkat regional maupun nasional.

Pada aspek infrastruktur, diharapkan konektivitas wilayah semakin baik, akses terhadap pelayanan dasar semakin meningkat, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah semakin berkurang. Infrastruktur yang memadai akan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, diharapkan terwujud birokrasi yang profesional, inovatif, melayani, dan berorientasi pada hasil. Pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Pada akhirnya, seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan melalui RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diharapkan mampu mempercepat terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, produktif, dan berdaya saing. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan serta semangat kebersamaan dan gotong royong, Kabupaten Pulau Taliabu diyakini akan mampu mewujudkan visi pembangunan daerah sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, Adaptif) yang Maju di Provinsi Maluku Utara, sekaligus menjadi daerah kepulauan yang tumbuh secara berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing pada masa yang akan datang.

7.5 Kesimpulan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu pada Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi pembangunan daerah menuju terwujudnya Kabupaten MUDA yang maju, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Berbagai program pembangunan yang direncanakan pada tahun 2027 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan yang masih dihadapi, sekaligus mengoptimalkan berbagai peluang yang dimiliki daerah. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya tahan lingkungan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah kepulauan memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Kondisi wilayah yang tersebar, keterbatasan konektivitas antarwilayah, kerentanan terhadap bencana alam, serta masih terbatasnya kapasitas infrastruktur menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki berbagai potensi strategis yang dapat menjadi modal utama pembangunan daerah, antara lain potensi sumber daya kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan, energi, serta sumber daya manusia yang terus berkembang. Potensi tersebut perlu terus dikelola secara optimal agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berupaya memastikan bahwa seluruh program pembangunan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang daerah.

7.6 Refleksi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

7.6.1 Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu.

Sebagai daerah kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekologi.

Pembangunan pada sektor ini diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
2. Menurunkan tingkat kerusakan hutan dan lahan.
3. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah.
4. Meningkatkan kualitas kawasan pesisir dan laut.
5. Mengurangi risiko bencana.
6. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
7. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap dampak perubahan iklim.

Keberhasilan pembangunan pada sektor lingkungan hidup akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial Kabupaten Pulau Taliabu.

7.6.2 Pembangunan Infrastruktur yang Mendorong Produktivitas Ekonomi Wilayah

Infrastruktur merupakan prasyarat utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan konektivitas wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.

Prioritas pembangunan infrastruktur pada Tahun 2027 diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas jalan kabupaten.
2. Pembangunan jembatan strategis.
3. Pengembangan transportasi antarwilayah.
4. Penyediaan air minum dan sanitasi.
5. Pengembangan jaringan telekomunikasi.
6. Peningkatan akses listrik masyarakat.
7. Pengembangan kawasan permukiman.
8. Infrastruktur pendukung kawasan produksi dan sentra ekonomi.

Melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, diharapkan biaya logistik dapat ditekan, konektivitas wilayah meningkat, serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang secara lebih optimal.

7.6.3 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi investasi jangka panjang yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Pembangunan sumber daya manusia pada Tahun 2027 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Menurunkan angka stunting.
4. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
6. Meningkatkan pemberdayaan perempuan.
7. Meningkatkan perlindungan anak.
8. Meningkatkan kapasitas pemuda dan olahraga.
9. Memperkuat pembangunan karakter masyarakat.

Melalui berbagai intervensi tersebut diharapkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu semakin meningkat sehingga mampu bersaing dalam era pembangunan yang semakin dinamis.

7.6.4 Penguatan Pertumbuhan, Pemerataan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus mampu dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat pemerataan hasil pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada:

1. Pengembangan sektor pertanian.
2. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan.
3. Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif.
4. Peningkatan investasi daerah.
5. Pengembangan pariwisata.
6. Penguatan ketahanan pangan.
7. Penciptaan lapangan kerja.
8. Pengurangan tingkat kemiskinan.

9. Pengurangan kesenjangan wilayah.

Melalui kebijakan tersebut diharapkan tercipta struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

7.6.5 Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah

Transformasi pelayanan publik merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam era digital dan tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Pembangunan pada sektor ini diarahkan untuk:

1. Penguatan reformasi birokrasi.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.
5. Penguatan tata kelola keuangan daerah.
6. Pengembangan inovasi daerah.
7. Penguatan kapasitas aparatur.
8. Peningkatan partisipasi masyarakat.

Keberhasilan transformasi pelayanan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memperkuat efektivitas pembangunan daerah.

7.7 Tantangan dan Prospek Pembangunan Daerah

Ke depan, Kabupaten Pulau Taliabu masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius, antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
2. Kesenjangan pembangunan antarwilayah.
3. Kerentanan terhadap bencana alam.
4. Tantangan perubahan iklim.
5. Kualitas SDM yang perlu terus ditingkatkan.
6. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih perlu ditekan.
7. Keterbatasan infrastruktur dasar.
8. Daya saing ekonomi daerah yang perlu diperkuat.

Namun demikian, berbagai peluang pembangunan juga tersedia, antara lain:

1. Bonus demografi.
2. Potensi kelautan dan perikanan.
3. Potensi perkebunan dan pertanian.
4. Potensi pariwisata bahari.
5. Perkembangan teknologi digital.
6. Dukungan kebijakan nasional dan provinsi.
7. Peluang investasi daerah.

Dengan memanfaatkan berbagai peluang tersebut secara optimal, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki prospek yang besar untuk menjadi salah satu daerah maju di Provinsi Maluku Utara.

7.8 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan wajib:

1. Menjadikan RKPD Tahun 2027 sebagai pedoman utama pembangunan daerah.
2. Menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
4. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien dan akuntabel.
6. Mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
7. Mengutamakan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada masyarakat.
8. Mengembangkan inovasi sebagai instrumen peningkatan kinerja pemerintahan.

RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi pedoman sekaligus instrumen strategis dalam mengarahkan seluruh sumber daya pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dengan semangat **MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, Adaptif)**, seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dan gotong royong dalam membangun daerah. Keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Akhirnya, dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa serta didukung komitmen dan kerja keras seluruh elemen daerah, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diharapkan mampu menghasilkan kemajuan yang nyata menuju terwujudnya **Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, Adaptif) yang Maju di Provinsi Maluku Utara**, serta menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan daerah pada tahun-tahun berikutnya.